

PERAN TNI-AD PADA MASA AGRESI MILITER BELANDA II DI KEBUMEN TAHUN 1948-1949

THE ROLE OF THE TNI-AD ON THE DUTCH MILITARY AGGRESSION II IN KEBUMEN 1948-1949

Oleh: Anggit Kurnia Wahyu Lestari, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, anggitkurniawl@gmail.com

Abstrak

Kondisi geografis di Kebumen merupakan pegunungan dan pesisir, maka tidak mengherankan jika wilayah ini selama perang melawan penjajah merupakan lokasi yang sangat strategis, kondisi politik dan sosial menjelang Agresi Militer Belanda II di Kebumen tidak stabil dikarenakan Belanda masih menduduki sebagian wilayah Indonesia termasuk Kebumen. Berdirinya TNI sebagai alat negara bertugas menghadapi segala bentuk ancaman bagi Republik Indonesia seperti membentuk pemerintahan Militer di Jawa guna menghadapi Agresi Militer Belanda II. Peran TNI beserta masyarakat mampu menahan perlawanan Belanda dengan Strategi Gerilya, bumi hangus dan aksi-aksi sabotase pada agresi militer II, karena TNI serta masyarakat bersatu dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Agresi Militer Belanda II, TNI AD, Kebumen*

Abstract

The geographical conditions in Kebumen are mountainous and coastal, so it is not surprising that this region during the war against invaders was a very strategic location. Political and social conditions ahead of the Dutch Military Aggression II in Kebumen were unstable because the Dutch were still occupying a part of Indonesia including Kebumen. The establishment of the TNI as a state instrument was tasked with facing all forms of threats to the Republic of Indonesia such as forming a Military government in Java to face the Dutch Military Aggression II. The role of the TNI and the community was able to resist Dutch resistance with the Guerrilla Strategy, scorched earth and acts of sabotage on military aggression II, because the TNI and the community were united in an effort to defend the independence of the Republic of Indonesia.

Keywords: Dutch Military Aggression II, TNI AD, Kebumen

PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Kemenangan yang diraih bukanlah milik satu golongan saja, melainkan merupakan kemenangan dan kemerdekaan segenap elemen bangsa.¹ Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan berarti perjuangan telah selesai. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Belanda ingin kembali menjajah Indonesia karena kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dan mampu menghasilkan keuntungan besar. Indonesia yang sudah memproklamkan kemerdekaannya tidak serta merta bebas dari belenggu penjajah. Rakyat Indonesia masih mengalami masa yang cukup berat dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Ketika Jepang kalah pada Perang Dunia II, kedatangan sekutu mendapat tanggapan netral oleh bangsa Indonesia, tetapi kemudian bangsa Indonesia mengetahui bahwa bersama dengan sekutu datang juga NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) dibawah pimpinan *O. Van Der Plas* yang menjadi wakil mutlak dari *Van Mook* dengan tujuan ingin kembali menguasai Indonesia. Terhadap tujuan itu rakyat Indonesia berubah menjadi penuh kecurigaan dan bersikap bermusuhan. Keadaan ini menjadi semakin buruk karena NICA mempersenjatai KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*) yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang. Di kota-kota

yang diduduki oleh Sekutu, seperti Jakarta dan Bandung, anggota KNIL ini memancing kerusuhan dengan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer pertama. Pasukan-pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Pasukan-pasukan yang lebih kecil digerakkan untuk mengamankan wilayah Semarang. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan.² Pasca Belanda melakukan agresi militer yang pertama tanggal 21 Juli 1947, sempat diserukan adanya penghentian tembakan-tembak oleh Dewan Keamanan PBB, yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1947. Belanda tidak menghiraukan seruan dari Dewan Keamanan PBB tersebut. Serangan terhadap Ibu Kota Republik Yogyakarta memang dihentikan, namun pasukan Belanda di beberapa daerah terus maju lebih ke depan ke dalam teritorial yang masih diduduki oleh Republik. Pasukan Belanda mengepung wilayah-wilayah RI yang didalamnya terdapat pasukan Indonesia, kemudian melakukan tindakan militer untuk merebut kekuasaan dalam wilayah tersebut. Tindakan yang ditunjukkan oleh Belanda ini disebut juga dengan kegiatan “gerakan pembersihan”. Tindakan-tindakan militer yang dilakukan oleh

¹Endar Wismulyani, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2009), hlm. 3.

²Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 338-339.

Belanda merangsang timbulnya perlawanan dan pertempuran sengit di daerah-daerah.

Selama masa revolusi banyak perlawanan baik secara fisik maupun diplomasi. Pada 17 Januari 1948, pemerintah Republik Indonesia bersama Belanda menandatangani Perjanjian Renville yang meliputi gencatan senjata secara militer berdasarkan garis *Van Mook*.³ Perjanjian Renville sebenarnya merugikan pihak Indonesia karena menjadikan pertahanan TNI semakin sempit. Indonesia harus mengambil sikap dan keputusan terhadap Belanda. Berawal dari penolakan yang keras terhadap garis *Van Mook* tersebut, akhirnya Indonesia dengan terpaksa mengakui garis demarkasi *Van Mook*.⁴ Pasukan TNI kemudian berpindah dari tempat-tempat gerilya yang berada di garis demarkasi *Van Mook* ke wilayah Republik Indonesia, seperti dari Jawa Barat ke wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah.

Panglima Besar Jenderal Sudirman menugaskan Kolonel A. H. Nasution untuk menyusun konsep pertahanan yang dikenal sebagai Perintah Siasat No.1, yang dikeluarkan oleh panglima besar sebagai Perintah Siasat No.1/Stop/48 tertanggal 12 Juni 1948.⁵

Perintah Siasat tersebut disahkan oleh pemerintah pada tanggal 9 November 1948 menjadi Peraturan Pemerintah No.30 dan 70, tahun 1948. Kekuatan senjata TNI jauh dibawah senjata Belanda, maka disusun rencana perang gerilya serta sistem pertahanan *Wehrkreise* (wilayah pertahanan).

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer untuk kedua kalinya dengan tujuan menghancurkan kedaulatan dan menguasai kembali wilayah Republik Indonesia yang pada saat itu Ibu Kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Penyerangan terhadap Ibu Kota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo.⁶ Pemboman dan penembakan dari udara berlangsung selama kurang lebih empat puluh lima menit. Beberapa bangunan dilapangan terbang rusak dan hancur. Pertahanan Yogya berada dibawah tanggungjawab Brigade 10 pimpinan Letkol Soeharto. Akan tetapi, sebagian besar pasukannya sudah ditarik ke luar kota untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda dari arah Gombong.⁷

Pos pengawasan dan pengamanan RI sepanjang garis demarkasi/status quo Kemit

³MC Turnan, George, *Nasionalisme & Revolusi di Indonesia*, (Depok : Komunitas Bambu, 2013). hlm. 326.

⁴Anggie Akhmad Pramudita, "Peranan Tentara Pelajar di Kulon Progo Dalam Perang Kemerdekaan II 1948-1949", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2017), hlm. 3.

⁵Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Diplomasi atau*

Bertempur Jilid IX, (Bandung: Angkasa, 1977), hlm. 145.

⁶Batara. R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, (Yogyakarta: Matapadi Presindo, 2016), hlm. 70.

⁷Markas Besar TNI, *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*, (Jakarta: Pusat Sejarah Dan Tradisi TNI, 2002), hlm. 176.

terbagi atas Sektor Utara dan Sektor Selatan.⁸ Belanda masuk dari arah barat ke kota Kebumen bagian selatan dengan kereta api, dan bagian utara dengan jeep, panser wagen, dan tank kurang lebih sebanyak 50 buah yang merupakan *Stoot Troop*.⁹ Kali Kemit di Karanganyar wilayah Kebumen mempunyai peran penting sebagai garis demarkasi dengan wilayah sebelah Barat Kali Kemit sebagai wilayah milik Belanda dan disebelah Timur sebagai Wilayah Republik Indonesia dan sebagai basis pertahanan TNI untuk mempertahankan Wilayah Republik Indonesia dan menghalau pergerakan tentara Belanda dan perseniataannya untuk menyerang dan menguasai Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah. Pengertian metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁰ Metode penelitian sejarah terdiri dari *heuristik*, kritik sumber, *interpretasi*, dan *historiografi*. Pertama, *heuristik* merupakan langkah-langkah pengumpulan sumber. Sumber yang dikumpulkan harus memiliki informasi yang

sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Kedua, Kritik sumber merupakan langkah-langkah untuk menentukan kebenaran informasi dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sejarah yang nantinya akan diungkap dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, *interpretasi* ini merupakan kegiatan penelitian untuk menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah melalui kritik baik intern dan ekstern. Keempat, *historiografi* atau penulisan adalah langkah terakhir dari penulisan karya sejarah. Historiografi merupakan kegiatan menyampaikan sintesis dari penelitian yang ditulis secara kronologis melalui tahap-tahap di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH KEBUMEN

Kebumen merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Kebumen adalah salah satu kota kabupaten yang termasuk Karesidenan Kedu dan terletak di pantai selatan, sehingga sering disebut Kedu Selatan. Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27-7°50 Lintang Selatan dan 109°22 - 109°50 Bujur Timur.¹¹ Luas seluruh

⁸Soetardjo Wirjopranoto, H. R. G. Soedarsono, dkk, *Gelegar di Begelen*, Keluarga Resimen Kedu, 2013, hlm. 190.

⁹*Ibid.*, hlm.191.

¹⁰Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32.

¹¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, *KEBUMEN Dalam Angka 2010*,

wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 Ha atau 1.281,115 Km² yang terdiri dari daerah pegunungan di sebelah utara, daerah daratan dibagian tengah dan daerah pantai di sebelah selatan.¹² Kabupaten Kebumen termasuk dalam karesidenan Kedu, Jawa Tengah bagian selatan, yang terbagi menjadi 5 kawedanan, 22 kecamatan, dan 463 desa. Kota-kota kawedanan atau kecamatan setempat dilalui jalan raya atau jalan kereta api, dan selebihnya adalah desa-desa dengan bukit-bukit di utara dan laut di selatan. Tidak ada kota pelabuhan.¹³ Mata pencaharian pokok penduduk Kebumen adalah bercocok tanam dan bertani, oleh karena keadaan tanahnya yang cukup subur. Pertanian di daerah tersebut dilakukan baik di bagian selatan maupun di dataran tinggi (pegunungan). Hasil-hasil pertanian yang dikeluarkan di daerah Kebumen adalah padi, kelapa, sayur-sayuran, buah-buahan, jagung, kedelai dan singkong, sedangkan hasil hutan di pegunungan berupa kayu jati dan kayu bakar.¹⁴

(Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2010), hlm. 3.

¹²Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Pusat Ilmiah dan Pembangunan Regional (PIPR) Jawa Tengah dan DIY, *Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen*, (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Pusat Ilmiah dan Pembangunan Regional (PIPR) Jawa Tengah dan DIY, 1989), hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

Kelompok etnis yang paling banyak setelah suku Jawa adalah warga keturunan Tionghoa. Mata pencaharian yang utama kelompok etnis ini adalah berdagang dan lainnya bekerja di bidang swasta. Predikat yang diberikan kepada pekerjaan etnis Tionghoa ini adalah *Cino Mrindring*. *Cina Mrindring* yaitu kelompok pemberi modal kepada petani di desa yang kemudian pada waktu panen mereka juga bertindak sebagai penaksir dan pembeli panen dari petani tersebut. Kelompok etnis Arab dan Belanda tidaklah terlalu meyakinkan peranannya karena jumlahnya yang terbilang sedikit.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 Pemerintah Hindia Belanda memberikan hak otonom dan pembentukan dewan daerah pada setiap keresidenan (*gewest*) dan kota-kota besar (*gemeente*). Di dalam perkembangan selanjutnya pemberian hak otonom dan desentralisasi tersebut dijalankan dalam bentuk penyerahan kekuasaan yang dipegang oleh pegawai pamong praja bangsa Belanda kepada pegawai pamong praja bangsa Indonesia. Kehendak politik bagi bangsa Belanda ini dikenal dengan *ontvoogding* dan dilaksanakan pada tahun 1918. Kabupaten yang memperoleh *ontvoogding* di Jawa Tengah ialah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kebumen.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 134-137.

Pada tahun 1930-an Pemerintah Hindia Belanda mengalami pasang surut dalam pengadaan dan pelaksanaan belanja negara. Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pengetatan anggaran belanja negara. Salah satu bentuk dari pengetatan anggaran belanja negara adalah dengan penyederhanaan tata pemerintahan dengan penggabungan daerah-daerah kabupaten atau *regentschap*.

Penggabungan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen merubah tatanan pemerintahan di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen harus memperhatikan pegawai yang semula bertugas di Kabupaten Karanganyar dipindah tugaskan menjadi pegawai di Kabupaten Kebumen. Keanggotaan Dewan Kabupaten selama masa transisi anggota Dewan Kabupaten Karanganyar turut bersidang sebagai anggota-anggota Dewan Kabupaten Kebumen dan didalamnya mempunyai hak sidang yang sama sampai terjadi pemilihan periodik selanjutnya. Dewan Kabupaten terdiri dari Bupati sebagai Ketua dan 36 anggota, yang diantaranya 5 warganegara orang Belanda, 27 warga Negara bumi putera (bukan orang Belanda) dan 4 warga negara luar bumi putera (bukan orang Belanda). (Lembaran Negara Hindia Belanda, 1935 No. 629). Bupati Karanganyar R.A.A. Iskandar Tirtokoesoemo dipindah ke Demak menggantikan R.A.A. Sosrohadiwijoyo (Adik Arungbinang VII), kemudian R.A.A. Sosrohadiwijoyo dipindah ke Kabupaten Kebumen menggantikan kakaknya dan

bergelar K.RT. Arungbinang VIII dan menjabat dari tahun 1934-1942.¹⁷

Kabupaten Kebumen secara administratif yang sampai sekarang berlaku ditentukan oleh Surat Keputusan tentang penggabungan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen dalam Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1935 Nomer 629. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal *De Jonge* Nomer 3 tertanggal 31 Desember 1935 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1936, sampai saat ini tidak berubah.¹⁸

Wilayah Kabupaten Kebumen dengan keadaan daerah pegunungan yang membujur dari barat sampai ke timur serta sebagian daerah masih berwujud hutan, maka pada masa perang melawan penjajah daerah ini merupakan lokasi gerilya yang sangat strategis. Selain itu Samudera Hindia dengan gelombang yang sangat besar merupakan faktor yang menguntungkan bagi rakyat Kebumen untuk mempertahankan daerahnya dari serangan musuh. Tidak hanya itu saja keadaan alam yang membantu rakyat Kebumen pada waktu perang melawan Belanda, tetapi dengan adanya dua sungai yang memegang peranan penting pada saat itu juga ikut membantu rakyat Kebumen. Sungai pada tahun 1947 sebagai garis demarkasi antara kekuasaan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 51.

¹⁸Pemda Kebumen, *Program Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990*, (Kebumen: Pemda Kebumen, 1989), hlm. 64.

Republik dengan kekuasaan Belanda yang berkedudukan di Gombong. Sungai Luk Ulo sebagai garis pertahanan bagi kota Kebumen, yaitu dengan dihancurkannya jembatan Tembono maka sulitlah bagi Belanda untuk memasuki kota Kebumen.¹⁹

B. AGRESI MILITER BELANDA II DI KEBUMEN

Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai Negara yang baru merdeka, Indonesia belum mempunyai organisasi militer yang teratur, yang ada hanyalah rakyat yang tergabung dalam laskar-laskar yang dengan sigap mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rakyat-rakyat yang tergabung dalam laskar-laskar tersebut merupakan bekas tentara PETA (Pembela Tanah Air), Heiho, prajurit pelaut dan KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*)

Pada 23 Agustus 1945 sesuai perintah Presiden, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pembentukan BKR di Kedu Selatan khususnya di wilayah Kebumen sama seperti pembentukan BKR di daerah-daerah lain. Pembentukan BKR melalui proses dan tahapan, namun sebelumnya diadakan musyawarah koordinasi antara bekas opsir PETA (Pembela Tanah Air) yang tertinggi pangkatnya dengan Bupati dan Kepala Polisi Negara. Koordinasi

tersebut menghasilkan keputusan pemanggilan para bekas prajurit PETA, Heiho, prajurit pelaut, KNIL dan seluruh pemuda didesa-desa dengan menggunakan surat serta jaringan radio.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 Presiden mengeluarkan Maklumat tentang dibentuknya badan kemiliteran yang resmi yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dibentuknya TKR tidak terlepas dari adanya ketidakpuasan para anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan pemuda pejuang karena pemerintah Republik Indonesia belum juga mendirikan dan membangun suatu tentara nasional yang resmi.

Berdasarkan penetapan pemerintah No.2 tanggal 7 Januari 1946 maka nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Hal ini berarti Tentara Keamanan Rakyat hanya berumur 93 hari, sejak tanggal 5 Oktober 1945 hingga 7 Januari 1946. Kemudian berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 26 Januari 1946, maka nama Tentara Keselamatan Indonesia (TKR) disempurnakan dan ditingkatkan statusnya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).²⁰

Pada tanggal 7 Juni 1947 keluar Penetapan Presiden No.24 Tahun 1947 tentang berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan demikian hanya ada satu organisasi militer di Indonesia yang merupakan peleburan dari TRI dan badan-badan kelaskaran bersenjata.

Pada tanggal 17 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani, namun masih belum menyelesaikan konflik antara Indonesia dan

¹⁹Darto Harnoko, *Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-1950*, (Yogyakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1987), hlm. 6.

²⁰Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianya*, (Semarang: CV. Borobudur Megah, 1977), hlm. 153.

Belanda, keadaan politik semakin tidak kondusif, Adanya pro dan kontra membuat terjadinya perselisihan terutama dari satuan laskar-laskar, badan perjuangan yang sudah terpengaruh oleh golongan kiri dengan pasukan hijrah yang datang dari kantong gerilya di daerah pendudukan. Mereka hijrah ke dalam wilayah Republik Indonesia yang sudah sempit karena harus mematuhi hasil perjanjian. Keadaan keuangan RI yang belum stabil dan harus mengelola 350.000 personil pasukan TNI, dan 470.000 anggota laskar perjuangan juga membuat perjuangan RI semakin berat. Panglima Besar Jenderal Soedirman kemudian mengeluarkan perintah harian yang ditujukan kepada semua anggota TNI yang terkena imbas dari perjanjian Renville, perintah ini kemudian menjadi pedoman bagi TNI dalam melakukan hijrah.²¹

Perundingan Renville menetapkan kali Kemit sebagai Garis Demarkasi yang membagi wilayah Republik Indonesia dan Belanda. Awalnya ditetapkan sepanjang sungai Kemit dimana sungai tersebut memisahkan sebagian wilayah Karanganyar dan Gombong yang merupakan daerah Garis Demarkasi. Garis batas wilayah Indonesia dan Belanda ini kemudian banyak dirubah karena perbatasan wilayah Karanganyar dan Gombong tidak semua terletak disepanjang sungai tersebut.

Pada tanggal 18 Desember 1948, Dr Beel, menyatakan pihaknya tidak terikat lagi oleh Perjanjian Renville dan pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mulai kembali melakukan serangan umum terhadap wilayah Republik. Dalam serangan yang kedua ini, Belanda mengadakan serbuan langsung dan mendadak terhadap Yogyakarta yang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia, serta tempat kedudukan Markas Besar TNI.

Belanda melakukan serangan ke lapangan terbang Maguwo, Panglima Besar Jenderal Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI). Keberhasilan Belanda menduduki dan menguasai Yogyakarta tidak berarti mendapat perlawanan dari pihak RI. Perlawanan yang ada hanya untuk memperlambat atau menghambat guna memberikan kesempatan pada pihak yang memerlukan.

Agresi militer Belanda ke II melalui garis demarkasi Kebumen dilancarkan dari Gombong ke kebumen, Tentara Belanda menyerang tujuh orang anggota Polisi keamanan (PK) yang terdiri dari CPM. Pada serangan umum ini secara serentak Belanda menggerakkan pasukannya dari berbagai garis demarkasi yaitu dari arah barat pasukan Belanda bergerak ke timur yaitu dari Gombong menuju Yogyakarta dengan menduduki Karanganyar, Kutowinangun, Prembun, dan Kebumen pada hari itu juga yang kemudian diteruskan menduduki Purworejo dan Magelang. Setelah berhasil menduduki Maguwo, Belanda meneruskan gerakannya merebut kota Yogyakarta, kemudian bergerak ke utara merebut Magelang bersama pasukan

²¹*Ibid.*, hlm. 100.

yang bergerak dari Purworejo. Dari arah Salatiga, pasukan Belanda bergerak ke Surakarta yang kemudian pecah menjadi dua pasukan di Boyolali. Satu pasukan menuju Surakarta dan yang satunya lagi menuju Yogyakarta melalui Klaten. Penjaga garis demarkasi Kemit gugur. Belanda berhasil masuk kota Kebumen, TNI dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor utara dibawah komando Mayor Sudharmo, di sektor selatan dibawah pimpinan Mayor Rahmat. Sasaran pertama pasukan Belanda pada waktu masuk ke kota Kebumen adalah Pabrik Mexolie/Sari Nabati.

Penyerangan Belanda yang secara mendadak membuat kepanikan di kota Kebumen, para anggota TNI bersama rakyat melakukan bumi hangus agar bangunan seperti pendopo Kabupaten Kebumen, Jembatan-jembatan, gedung pemerintahan, sekolah serta rumah penduduk tidak di duduki kembali sebagai markas oleh pihak Belanda. kapal terbang Belanda berputar-putar di langit Kebumen, dari pesawat terbang tersebut disebar surat-surat selebaran yang berisi himbauan agar penduduk tetap tenang.²² Namun semua masyarakat maupun pemerintah tetap panik, mereka mencari tempat pengungsian yang aman untuk berlindung ataupun menyimpan alat alat kantor yang masih bisa dibawa dan dimanfaatkan dan melaksanakan pengabdian tugas pemerintah di beberapa tempat.

²²Darto Harnoko, *Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-1950*, (Yogyakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1987), hlm. 57.

Pada 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang, kemudian pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi untuk mengupayakan penghentian tembakan-menembak antara Belanda dan Indonesia. Setelah Resolusi PBB, tentara Belanda tetap melancarkan aksinya dan semakin meluas walaupun Resolusi tersebut telah disepakati. Untuk pertama kalinya tentara Belanda mengadakan patrol di dalam kota Kebumen, yang sebelumnya hanya membaca situasi dan kondisi serta menerima berbagai informasi dari kaki tangannya. Dalam menghadapi tentara Belanda, TNI menggunakan strategi (Operasi Tempur) seperti penghadangan, penyerbuan dan perlawanan.

Rentetan perlawanan sengit yang ditunjukkan TNI, Belanda mulai kewalahan, maka atas desakan Dewan Keamanan PBB serta masyarakat Internasional berhasil memaksa Belanda untuk berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Selain itu Belanda dalam posisi yang sulit karena sudah tidak mendapat dukungan dari sekutu. Ditambah perlawanan TNI beserta rakyat semakin membuktikan keinginan yang kuat untuk mengusir Belanda dari Indonesia.

Dewan Keamanan PBB memprakarsai pembentukan UNCI (*United Nations Commission For Indonesia*) yang bertujuan membantu memperlancar penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 17 Mei 1949 UNCI yang dipimpin oleh Merle Cochran mempertemukan kedua belah pihak, Pihak Indonesia diwakili Mr. Moh. Roem, dari pihak Belanda diwakili Dr. J.H. Van Royen.

Persetujuan dan perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda akhirnya dapat dilaksanakan dengan menghasilkan Persetujuan Roem-Royen. Pada 22 Juni 1949 sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Roem-Royen, diadakan perundingan formal BFO (*Bijeen komst voor Federal Overleg*) antara Republik Indonesia dan Belanda dibawah pengawasan komisi PBB. Hasil perundingan tidak menghentikan pertikaian, Belanda tetap melakukan serangan, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Setelah melalui perundingan yang cukup alot, akhirnya pada tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB.²³ Dari hasil perundingan, hal yang paling penting adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949.

C. DAMPAK AGRESI MILITER BELANDA II DIKEBUMEN

Pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia belum stabil, hal ini terjadi karena beredarnya mata uang rupiah Jepang yang tidak terkendali. Inflasi semakin parah dengan diedarkannya uang cadangan yang bertujuan membiayai gaji pegawai Belanda. Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak karena belum mempunyai mata uang sendiri sebagai pengganti.²⁴

²³Bambang Edhy Prayitno, *KISAH PAK NARTO dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Dapur Buku, 2016), hlm. 107.

²⁴Marwati Djoened Pusponogoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional*

Pemerintah mengambil kebijakan untuk membangun kepercayaan rakyat dan memperbaiki perekonomian Indonesia seperti menetapkan berlakunya mata uang yang sah yaitu mata uang *De Javasche Bank*, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang. Untuk mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KKNIP), Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.

Pada 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang kertas yaitu Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabkan pada tanggal 6 Maret 1946, panglima sekutu mengumumkan berlakunya uang *NICA (Netherlands Indies Civil Administration)* di daerah-daerah yang diduduki serikat sebagai pengganti uang Jepang. Kemudian pada 1 November 1946 membentuk Bank Negara Indonesia yang bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Wilayah Republik Indonesia akibat perjanjian Renville menjadi sempit, pasukan TNI harus ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia dari kantong-kantong dibelakang garis musuh. Di Kebumen akibat perjanjian Renville yang membuat Kali Kemit ditetapkan sebagai Garis Demarkasi atau Status Quo. Dengan demikian Kali Kemit merupakan pintu keluar bagi para pejabat dan pasukan TNI Siliwangi dari Jawa Barat yang akan hijrah ke

Indonesia jilid VI, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 173.

Jawa Tengah. Kebumen mulai menerima pasukan hijrah TNI Siliwangi pada bulan Mei 1948,²⁵ Jumlah pasukan siliwangi yang sudah berhijrah sekitar 29.000 orang serta membawa keluarga mereka. Ini belum termasuk laskar-laskar seperti Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Hizbullah, Sabilillah, dan lain-lain. Jumlah keseluruhan yang ditampung dari Jawa Barat mencapai 40.000. Hijrahnya TNI Siliwangi membuat kota Kebumen menjadi kota yang padat karena dipenuhi oleh Tentara. Akibatnya harga barang-barang yang sudah tinggi bertambah tinggi lagi karena permintaan barang meningkat namun barang dipasaran jumlahnya tetap, maka barang-barang itu akan menjadi mahal.²⁶

Keadaan ekonomi di Kebumen kian memburuk hal ini semakin diperparah karena adanya blokade ekonomi Belanda yang membuat sulitnya mencari kebutuhan sehari-hari, hal ini berdampak harga melambung tinggi.

Pada bulan September sampai November 1949 keadaan di Kebumen tetap tegang. Dengan menggunakan persenjataan berat seperti tank, panser, kanon dan pesawat tempur.²⁷ Pasukan belanda menyerang desa-

desa yang menjadi pusat pengungsian dan markas pasukan gerilya. Pasukan gerilya tidak tinggal diam, mereka melakukan perlawanan. Bahkan perlawanan terakhir pada bulan Oktober 1949 yaitu perebutan kota Gombang oleh pasukan gerilya Republik Indonesia dibawah komando Mayor Sudharmo dan berhasil menguasai Gombang selama satu hari satu malam.

Pasca perundingan Roem-Royen sampai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, suasana di Kebumen yang sebelumnya terasa tegang dan mencekam berangsur-angsur mulai mengendor, pasukan belanda mulai ditarik mundur dari Kebumen, instansi-instansi yang diungsikan mulai masuk ke dalam kota. Penduduk pun mulai kembali ke dalam kota, dengan bahan-bahan dan peralatan yang ada, mereka membangun kembali kantor-kantor dan rumah-rumah yang telah hancur.

Setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia 27 Desember 1949. TNI melakukan konsolidasi, konsolidasi merupakan suatu kebiasaan yang baik apabila setelah usai melaksanakan tugas, konsolidasi dilakukan untuk menghadapi tugas berikutnya. Tugas yang baru saja di hadapi adalah Agresi Militer Belanda II yang melibatkan kesatuan TNI. Agresi Militer Belanda yang dilakukan secara mendadak menyebabkan beberapa kesatuan angkatan perang terkena pendudukan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pada masa Agresi Militer Belanda II terdapat anggota suatu kesatuan terpisah dengan kesatuannya sehingga mereka berinisiatif untuk

²⁵Fuad Yogo Hardyanto, *“Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Kebumen Tahun 1945-1950”*, Skripsi, (Solo: UNS, 2010), hlm. 70.

²⁶Wiyanto, dkk, *Kebumen Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1949*, (Grafika: Gombang, 2001), hlm. 14.

²⁷*Ibid.*, hlm. 108.

menggabungkan diri dan ikut aktif berjuang dalam kesatuan lain ataupun pada angkatan lain.

Anggota Angkatan Laut atau anggota Angkatan Udara ikut menggabungkan diri pada kesatuan Angkatan Darat, baik kesatuan tempur atau kesatuan territorial guna melaksanakan tugas Pemerintah Militer. Beberapa hal yang menyebabkan yaitu adanya kesatuan yang terlambat memberi intruksi kepada anggotanya mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota bila Agresi Militer Belanda II terjadi. Akibat kesatuannya bercerai-berai, anggota-anggotanya pun terpisah satu sama lain. Upaya untuk dapat menemukan induk kesatuannya, mereka mengalami kesulitan karena kehilangan jejak sehingga terpaksa mengambil inisiatif sendiri yaitu pulang kampung dan berjuang di daerah asalnya. Karena situasi serta kondisi pertahanan dan pertempuran, maka Anggota Angkatan Laut dan anggota Angkatan Udara tepat bila mempersatukan diri dan memperkuat perang gerilya semesta di daerah dimana mereka berada.²⁸

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah perjuangan semesta, maka bagi yang aktif berjuang meskipun diluar kesatuan atau angkatannya, hal tersebut tidak perlu dianggap sebagai hal yang merugikan.

Kesatuan militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pendataan ulang personilnya. Bagi personil yang terus-menerus ikut aktif dalam kesatuannya selama Agresi

Militer Belanda II dinyatakan tidak ada masalah. Kemudian bagi personil yang menggabungkan diri dengan kesatuan lain terlebih dahulu harus melengkapi dengan surat rekomendasi dari komandan kesatuan sekurang-kurangnya komandan batalyon untuk kesatuan tempur dan komandan distrik militer untuk kesatuan territorial dimana selama Agresi Militer Belanda II menggabungkan diri dan aktif berjuang dalam kesatuannya²⁹

Kemudian setelah dilakukan pendataan, tiap kesatuan menata kembali kesatuannya personilnya untuk menghadapi tugas selanjutnya. Tiap kesatuan membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi seperlunya terhadap mereka yang semasa gerilya tidak ada dalam kesatuan. Tim memperhatikan rekomendasi dari komandan kesatuan dimana anggota yang bersangkutan menggabungkan diri.

kesatuan militer (TNI) melakukan pendataan ulang personilnya. Bagi personil yang terus-menerus ikut aktif dalam kesatuannya selama Agresi Militer Belanda II dinyatakan tidak ada masalah. Kemudian bagi personil yang menggabungkan diri dengan kesatuan lain terlebih dahulu harus melengkapi dengan surat rekomendasi dari komandan kesatuan sekurang-kurangnya komandan batalyon untuk kesatuan tempur dan komandan distrik militer untuk kesatuan territorial dimana selama Agresi Militer Belanda II menggabungkan diri dan aktif berjuang dalam kesatuannya³⁰

²⁸*Ibid.*, hlm. 268.

²⁹*Ibid.*, hlm. 269.

³⁰*Ibid.*, hlm. 269.

Kemudian setelah dilakukan pendataan, tiap kesatuan menata kembali kesatuannya personilnya untuk menghadapi tugas selanjutnya. Tiap kesatuan membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi seperlunya terhadap mereka yang semasa gerilya tidak ada dalam kesatuan. Tim memperhatikan rekomendasi dari komandan kesatuan dimana anggota yang bersangkutan menggabungkan diri.

D. KESIMPULAN

Kebumen merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Kebumen dengan keadaan daerah pegunungan yang membujur dari barat sampai ke timur serta sebagian daerah masih berujud hutan, maka pada masa perang melawan penjajah daerah ini merupakan lokasi gerilya yang sangat strategis. Kondisi sosial politik menjelang Agresi Militer Belanda II di Kebumen tidak stabil dikarenakan Belanda masih menduduki sebagian wilayah Indonesia termasuk Kebumen. Kemudian muncul berbagai organisasi kelaskaran yang mempunyai tujuan utama yaitu berjuang mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada 23 Agustus 1945 sesuai perintah Presiden, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai wadah perjuangan. Namun pada 5 Oktober 1945 Presiden mengeluarkan Maklumat tentang dibentuknya badan kemiliteran yang resmi yaitu TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Tentara Keamanan Rakyat (TKR) disempurnakan organisasinya dan berubah nama menjadi

Tentara Keselamatan Rakyat. Tidak lama kemudian berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 26 Januari 1946, maka nama Tentara Keselamatan Indonesia (TKR) disempurnakan dan ditingkatkan statusnya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Tentara Republik Indonesia (TRI) adalah satu-satunya organisasi militer Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 1947 keluar Penetapan Presiden No.24 Tahun 1947 tentang berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan peleburan TRI dan laskar bersenjata. Dengan demikian tidak ada lagi kesatuan-kesatuan bersenjata diluar TNI sebagai wadah perjuangan para pejuang yang baru.

Ketika perundingan Renville disepakati pada 17 Januari 1948 menghasilkan Perjanjian Renville, sebagai tindak lanjut Perjanjian Renville, Kali Kemit ditetapkan sebagai Garis Demarkasi atau Garis Status Quo. Pasukan-Pasukan TNI yang berada di kantong-kantong yang diduduki Belanda harus ditarik keluar. Pada saat puncak Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, Belanda menyerang Ibukota Yogyakarta melalui serangan udara Lapangan Udara Maguwo. Penyerangan dilakukan karena Belanda berniat menguasai Indonesia kembali dengan menghancurkan TNI dan pemimpin-pemimpin pemerintahan Indonesia. Serangan Belanda mendapat perlawanan dari TNI.

Tentara Belanda melakukan serangan diberbagai wilayah termasuk ke wilayah Kebumen yang memakan korban 7 petugas keamanan penjaga garis status Quo. Sasaran pertama pasukan Belanda ke kota Kebumen adalah Pabrik Mexolie di Panjer, Kebumen.

Karena cepatnya pasukan Belanda masuk kota Kebumen menyebabkan gagalnya aksi bumi hangus, pejuang yang tengah beraksi tertangkap dan ditembak mati oleh Belanda, Instansi-instansi pemerintahan mengambil tindakan untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman dan terus menjalankan tugasnya.

Pasukan TNI melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang mengadakan patroli, baik di pusat kota maupun di desa-desa di wilayah Kebumen. Sabotase-sabotase dan penyerangan terhadap pasukan Belanda ini tidak hanya menimbulkan kerugian di pihak pasukan Belanda, tetapi juga di pihak Indonesia. Tidak jarang, upaya ini menimbulkan korban jiwa baik di pihak Belanda maupun di pihak TNI dan warga sipil. Namun demikian, Hal tersebut tidak menyurutkan langkah TNI bersama warga sipil yang ada di wilayah Kebumen untuk tetap berjuang sebagai Negara baru yang merdeka dan berdaulat. TNI bersama warga sipil berperan penting sebagai pihak yang senantiasa berupaya mengusir pendudukan Belanda sampai akhirnya tercapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia serta pelaksanaan Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

ANRI, *Daftar Pelanggaran Belanda yang tidak sesuai dengan pokok-pokok yang tertantum dalam persetujuan Renville dari tanggal 11 sampai 20 Djuni 1948*. ANRI, *Pelanggaran Persetujuan Renville*, No. cx 7/6/22.

ANRI, *Pelanggaran Persetujuan Renville*, No. cx 7/6/22.

ANRI, *Laporan insident di daerah yang di demiliterisir*, No. Pol/49/34/15/Rahasia.

Buku:

Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia; Diplomasi atau Bertempur Jilid IX*, Bandung: Angkasa, 1977.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, *Kebumen Dalam Angka 2010*, Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2010.

Bambang Edhy Prayitno, *Kisah Pak Narto dari Masa ke Masa*, Jakarta: Dapur Buku, 2016.

Batara. R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, Yogyakarta: Matapadi Presindo, 2016.

Darto Harnoko dan Poliman, *Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1949-1950*, Yogyakarta: BPSNT, 1987.

Endar Wismulyani, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih, 2009.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.

Turnan M.C, George, *Nasionalisme & Revolusi Di Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2013.

Pemda Kebumen, *Program Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990*, Kebumen: Pemda Kebumen, 1989.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Pusat Ilmiah dan Pembangunan Regional (PIPR) Jawa Tengah dan DIY, *Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen*, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Pusat Ilmiah dan Pembangunan Regional (PIPR) Jawa Tengah dan DIY, 1989.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI (Edisi Pemutakhiran)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Ricklefs, M. C, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya*, Semarang: CV. Borobudur Megah, 1977.

Soetardjo Wirjopranoto, H. R. G. Soedarsono, dkk, *Gelegar Di Begelen*, Keluarga Resimen Kedu, 2013.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah, 2013.

Wiyanto, dkk, *Kebumen Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1949*, Grafika: Gombong, 2001.

Skripsi:

Anggie Akhmad Pramudita, "Peranan Tentara Pelajar di Kulon Progo Dalam Perang Kemerdekaan II 1948-1949", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2017.

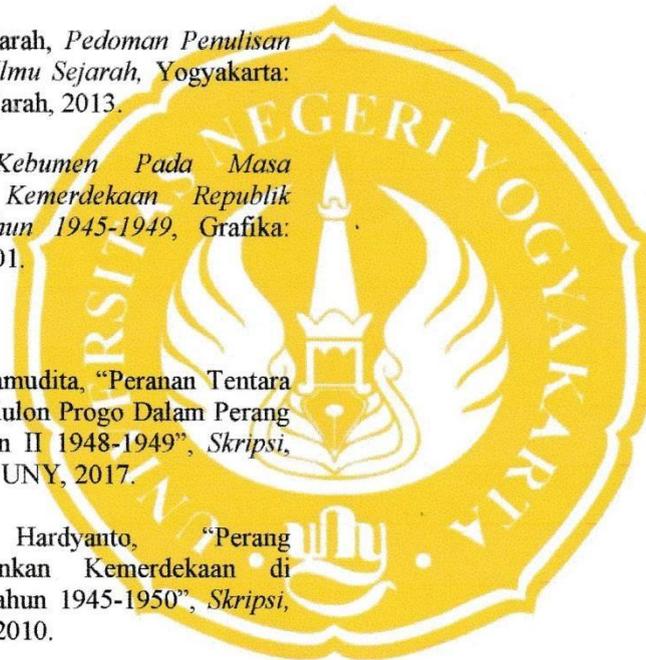
Fuad Yogo Hardyanto, "Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Kebumen Tahun 1945-1950", *Skripsi*, Solo: UNS, 2010.

Jurnal:

Muhibas Sabri Selamat Pratama, "Peranan TNI-AD Pada Masa Agresi Militer Belanda II Di Magelang tahun 1948-1949" *Jurnal Sejarah*, Yogyakarta: UNY, 2017.

Biodata:

Nama : Anggit Kurnia Wahyu Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 2 Juli 1996
Riwayat Pendidikan : SD N 5 Panjer
SMP N 4 Kebumen
MAN 2 Kebumen



Yogyakarta, Juli 2019

Pembimbing

Danar Widiyanta, M.Hum
NIP.19681010 199403 1 001

Reviewer

Dra. Dina Dwikurniarini, M.Hum
NIP. 19571209 198702 2 001